

ABSTRAK

Muhammad Zhalifunnas Najib Wahyu, 1213030098, 2026, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini Berangkat dari kondisi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Ngawi yang hingga saat ini belum sepenuhnya merata, meskipun telah diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. kondisi tersebut menunjukkan bahwasannya ada perbedaan antara ketentuan normative dalam regulasi dengan realitas pelaksanaan yang terjadi di lapangan. infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 dalam pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaany, serta mengkaji kebijakan tersebut dari siyasah dusturiyah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori hukum pembangunan untuk melihat bagaimana suatu kebijakan disebuah wilayah dapat terjalankan dan juga terealisasikan untuk mengatasi pemerataan akan suatu pembangunan, teori implementasi kebijakan untuk menilai bagaimana sebuah kebijakan yang telah terbentuk menjadi produk hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan teori siyasah dusturiyah untuk mengkaji kebijakan terkait penyelenggaraan jalan daerah dalam pemerintahan Islam yang mementingkan kemaslahatan dan juga adil.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analisis. data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Perda Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 pada prinsipnya telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan ekonomi. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal akibat keterbatasan anggaran, kondisi geografis, kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi dan pengawasan antarinstansi yang belum maksimal. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan ini secara normatif telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah, tetapi membutuhkan penguatan implementasi agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Infrastruktur Jalan, Siyasah Dusturiyah